



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 September 2019

Nomor : 660/9614/SJ
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Percepatan Penyusunan dan Penetapan
RDTR dan PZ dalam rangka Pelaksanaan
Online Single Submission

Yth. Daftar Terlampir
di –

Tempat

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), bersama ini disampaikan kepada Saudara Bupati/Wali Kota hal – hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menetapkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) sebagai dasar dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang untuk investasi di daerah.
2. Sebagai upaya percepatan, Pemerintah Pusat telah menetapkan 57 (lima puluh tujuh) Daerah Kabupaten/Kota di 21 (dua puluh satu) Daerah Provinsi sebagai daerah dengan nilai investasi tinggi, yang akan difasilitasi dalam bentuk bantuan teknis penyusunan RDTR dan PZ. Daftar Daerah Kabupaten/Kota terlampir.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk:
 - a. membentuk Pokja KLHS yang terintegrasi dengan Tim Penyusun RDTR serta mengalokasikan pendanaan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 – 2020 untuk keperluan penyusunan dan penetapan RDTR dan PZ dimaksud;
 - b. melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga teknis terkait dalam penyusunan materi teknis/naskah akademis, raperda, dan album peta. Kementerian ATR/BPN secara khusus akan memberikan bantuan teknis penyusunan RDTR dan PZ;
 - c. melibatkan DPRD Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penetapan RDTR dan PZ. Pelibatan DPRD termasuk pengagendaan penyusunan dan penetapan raperda kedalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) Tahun 2019 – 2020.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.



Menteri Dalam Negeri,

Tienjo Kumolo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota terkait; dan
10. Gubernur terkait.

LAMPIRAN

NOMOR : 660/9614/SJ

TANGGAL : 18 September 2019

DAFTAR TERLAMPIR

1. Wali Kota Palembang
2. Bupati Banyuasin
3. Bupati Musi Banyuasin
4. Bupati Deli Serdang
5. Bupati Tapanuli Selatan
6. Bupati Tapanuli Utara
7. Bupati Batubara
8. Wali Kota Batam
9. Bupati Tanggamus
10. Bupati Lampung Selatan
11. Bupati Pelalawan
12. Wali Kota Dumai
13. Bupati Siak
14. Bupati Indragiri Hilir
15. Bupati Bengkalis
16. Wali Kota Cilegon
17. Bupati Tangerang
18. Bupati Buleleng
19. Bupati Sumbawa
20. Bupati Bogor
21. Bupati Purwakarta
22. Bupati Majalengka
23. Bupati Subang
24. Bupati Sukabumi
25. Bupati Bandung
26. Wali Kota Bogor
27. Bupati Sumedang
28. Bupati Jepara
29. Bupati Cilacap
30. Wali Kota Semarang
31. Bupati Batang
32. Bupati Pekalongan
33. Bupati Purbalingga
34. Bupati Gresik
35. Wali Kota Kediri
36. Bupati Sidoarjo
37. Bupati Lamongan
38. Bupati Ketapang
39. Bupati Sanggau
40. Bupati Sintang
41. Bupati Landak
42. Bupati Tabalong
43. Bupati Kotabaru
44. Wali Kota Balikpapan
45. Bupati Kutai Timur
46. Bupati Kutai Barat
47. Bupati Berau
48. Bupati Bulungan
49. Bupati Kotawaringin Timur
50. Bupati Gunung Mas
51. Bupati Maros
52. Wali Kota Makassar
53. Bupati Morowali
54. Wali Kota Kendari
55. Bupati Konawe
56. Bupati Bolaang Mongondow
57. Wali Kota Halmahera Selatan

LAMPIRAN

NOMOR : 660/9614/SJ

TANGGAL : 18 September 2019

DAFTAR 57 KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI NILAI INVESTASI TINGGI

I	Sumatera Selatan	IX	Jawa Barat	XIII	Kalimantan Selatan
1	Kota Palembang	20	Kab. Bogor	42	Kab. Tabalong
2	Kab. Banyuasin	21	Kab. Purwakarta	43	Kab. Kotabaru
3	Kab. Musi Banyuasin	22	Kab. Majalengka	XIV	Kalimantan Timur
II	Sumatera Utara	23	Kab. Subang	44	Kota Balikpapan
4	Kab. Deli Serdang	24	Kab. Sukabumi	45	Kab. Kutai Timur
5	Kab. Tapanuli Selatan	25	Kab. Bandung	46	Kab. Kutai Barat
6	Kab. Tapanuli Utara	26	Kota Bogor	47	Kab. Berau
7	Kab. Batubara	27	Kab. Sumedang	XV	Kalimantan Utara
III	Kepulauan Riau	X	Jawa Tengah	48	Kab. Bulungan
8	Kota Batam	28	Kab. Jepara	XVI	Kalimantan Tengah
IV	Lampung	29	Kab. Cilacap	49	Kab. Kotawaringin Timur
9	Kab. Tanggamus	30	Kota Semarang	50	Kab. Gunung Mas
10	Kab. Lampung Selatan	31	Kab. Batang	XVII	Sulawesi Selatan
V	Riau	32	Kab. Pekalongan	51	Kab. Maros
11	Kab. Pelalawan	33	Kab. Purbalingga	52	Kota Makassar
12	Kota Dumai	XI	Jawa Timur	XVIII	Sulawesi Tengah
13	Kab. Siak	34	Kab. Gresik	53	Kab. Morowali
14	Kab. Indragiri Hilir	35	Kota Kediri	XIX	Sulawesi Tenggara
15	Kab. Bengkalis	36	Kab. Sidoarjo	54	Kota Kendari
VI	Banten	37	Kab. Lamongan	55	Kab. Konawe
16	Kota Cilegon	XII	Kalimantan Barat	XX	Sulawesi Utara
17	Kab. Tangerang	38	Kab. Ketapang	56	Kab. Bolaang Mongondow
VII	Bali	39	Kab. Sanggau	XXI	Maluku Utara
18	Kab. Buleleng	40	Kab. Sintang	57	Kota Halmahera Selatan
VIII	Nusa Tenggara Barat	41	Kab. Landak		
19	Kab. Sumbawa				

Sumber: Hasil inventarisir Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, dan Kementerian ATR/BPN, 2019